



**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**DARMA JUNIANTI SIRAIT**

NPM : 1615100071

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**



FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DARMA JUNIATI  
NPM : 1615100071  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA.

MEDAN, JULI 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. RAHIMA Br. PURBA, S.E., M.Si, Ak., CA)



(Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. RAHIMA Br. PURBA, S.E., M.Si, Ak., CA)

PEMBIMBING II

(SUWARNO, S.E., M.M)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL  
SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : DARMA JUNIATI  
NPM : 1615100071  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA.

MEDAN, JULI 2021

KETUA

(Drs. NADJIB Ak, M.M)

PENGUJI -1

(Dr. RAHIMA B. PURBA, S.E., M.Si, Ak., CA)

PENGUJI-II

(SUWARNO, S.E., M.M)

PENGUJI-III

(VINA ARMITA, S.E., M.Si)

PENGUJI-IV

(ANGGI PRATAMA NASUTION, S.E., M.Si)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DARMA JUNIATI  
NPM : 1615100071  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darma Junianti  
Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Singkil / 21 Juni 1997  
NPM : 1615100071  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Jln. Budi Luhur Lorong Pribadi 11f

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2021



nyataan



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Darna Junianti Sirait  
 Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Meriah / 21 Juni 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100071  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 144 SKS, IPK 3.46  
 Nomor Hp : 085296801082  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi sumatera utara

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 18 Agustus 2021

Pemohon,

( Darna Junianti Sirait )

Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
Dekan

( Dr. Onny Medalia, S.H., M.Kn )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Ka. Prodi Akuntansi

( Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak.,CA. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

( Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak.,CA. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II:

( Suwarno, SE., M.M )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Darma Junianti Sirait  
NPM : 1615100071  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.  
Judul Skripsi : Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi sumatera utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
18 Juli 2020	Proses Bimbingan Telah Berjalan, ACC Sempro	Revisi	
12 April 2021	acc sidang	Disetujui	

Medan, 18 Agustus 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Darma Junianti Sirait  
NPM : 1615100071  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Suwarno, SE., MM  
Judul Skripsi : Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi sumatera utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
18 Juli 2020	Acc seminar proposal	Revisi	
20 Maret 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 18 Agustus 2021  
Dosen Pembimbing,



Suwarno, SE., MM



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4065/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : Darma Junianti Sirait  
NIM : 1615100071  
Kelas/Semester : Akhir  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Fakultas/Prodi : Akuntansi

Wajibannya terhitung sejak tanggal 24 April 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 24 April 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



UPT. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Phisni Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Analyzed document: **Darma-Juniantil\_1615100071\_Akuntansi.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

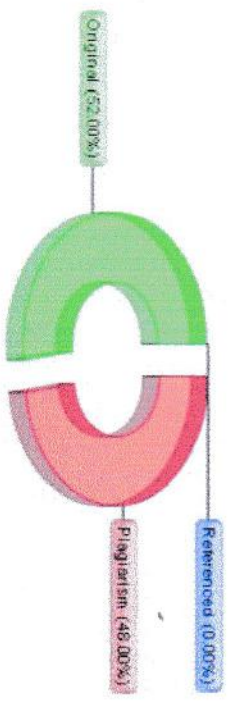
Comparison Preset: Rewrite Detected language(s)

Credit type: Internet Check



### Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 49

- 77% 9772 1. [http://pcc.fria.uns.ac.id/103926/NAASKAHE2PUBU\\_IPA.S1.pdf](http://pcc.fria.uns.ac.id/103926/NAASKAHE2PUBU_IPA.S1.pdf)
- 77% 9193 2. <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/psesi/article/download/1244/1058>
- 62% 7798 3. <https://reportcard.unsri.ac.id/index.php/psesi/article/download/4487/14295>

Acc jilid lux  
09/08 - 2024



**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

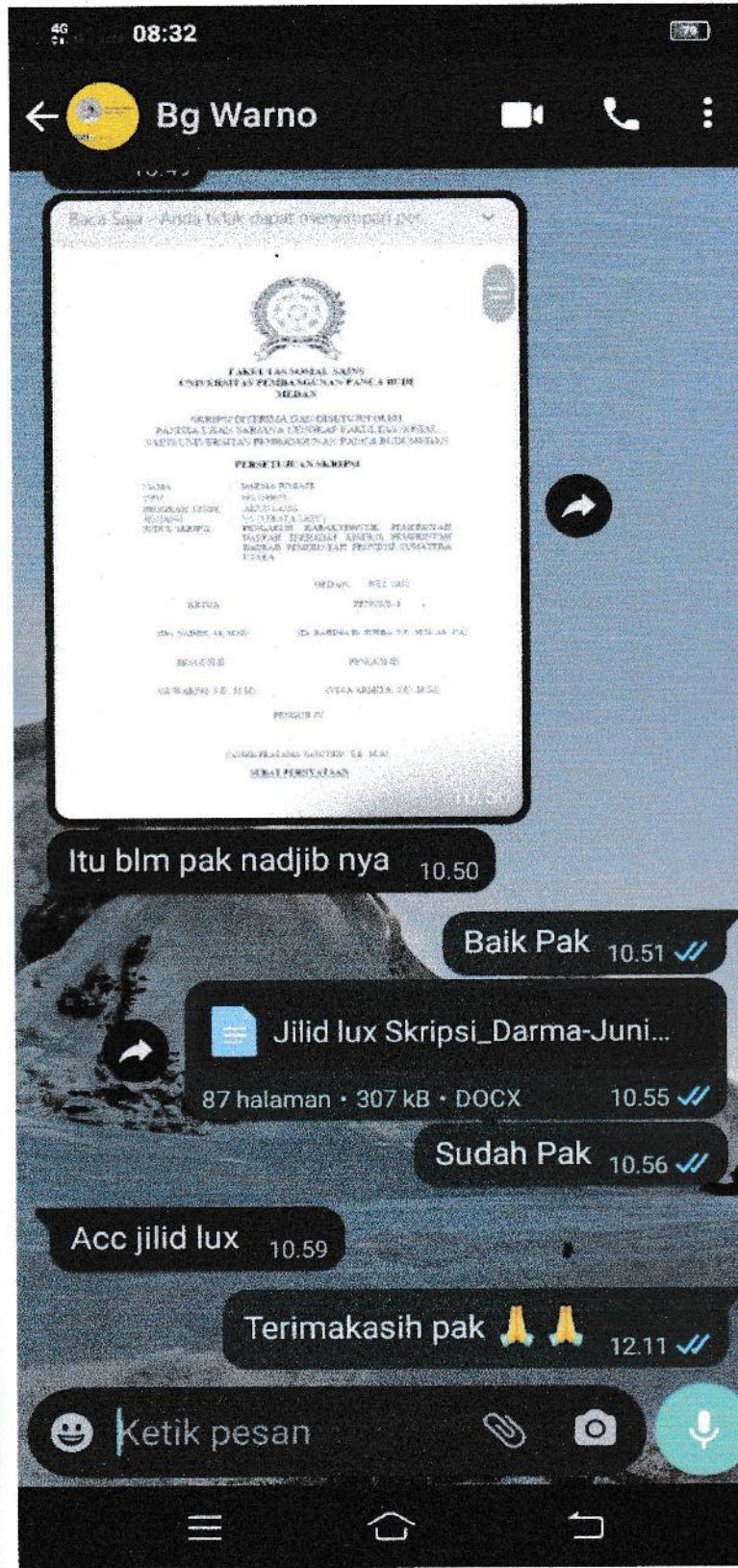
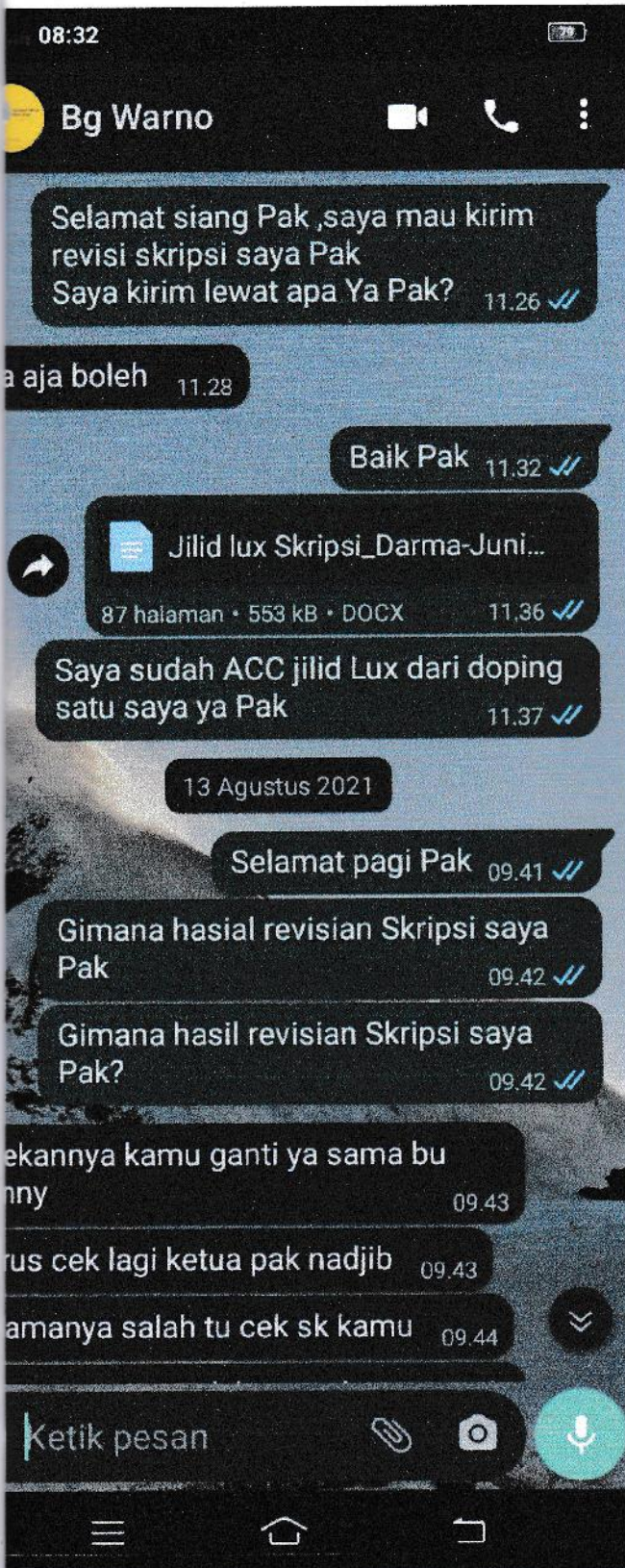
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**DARMA JUNIANTI SIRAIT**  
NPM : 1615100071

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**







Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 Agustus 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darma Junianti Sirait  
 Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Meriah / 21 Juni 1997  
 Nama Orang Tua : BOMBY ELYANDO SIRAIT  
 N. P. M : 1615100071  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Akuntansi  
 No. HP : 085296801082  
 Alamat : Jln. Budi Luhur

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi sumatera utara**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transki sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani do pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

**S**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



Darma Junianti Sirait  
 1615100071

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Dr. FATIMA W. PURBA, SE., M.Si., AK., CA.  
 Dosen Pembimbing II : SUWARDNO, SE., M.M.  
 Nama Mahasiswa : DARMA JUNIANTI SIRAIT  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100071  
 Jenjang Pendidikan : SE (Strata Satu)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09-08-2021	1 nama dean diganti 2 nama ketua di rubah		
10-08-2021	di daftar isi dirapikan		
13-08-2021	ACC silid lx		

Medan, 09 November 2021

Diketahui/Diestujui oleh :

Dekan



Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Darma Junianti Sirait
Tempat/Tgl. Lahir	: Gunung Meriah / 21 Juni 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1615100071
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 148 SKS, IPK 3.45
Nomor Hp	: 085296801082
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi sumatera utara

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

*(Signature)*  
( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 09 November 2021

Pemohon,

*(Signature)*  
( Darma Junianti Sirait )

Tanggal : .....

Disahkan oleh:  
Dekan

*(Signature)*  
( Dr. Chny Medaline, SH., M.Kn )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing I:

*(Signature)*  
( Dr Rahima dr. Purba, SE., M.Si., Ak., CA. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II:

*(Signature)*  
( Dr Oktiani Khamilah Siregar, SE., M.Si )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II:

*(Signature)*  
( Suwanda, S.E., M.M )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
Website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. RAHIMA br. PURBA, SE., M.Si., Ak., CA.
Dosen Pembimbing II : SUWARNO, S.E., M.M.
Nama Mahasiswa : DARMA JUNIANTI SIRAIT
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100071
Jenjang Pendidikan : ST. (strata satu)
Judul Tugas Akhir / Skripsi : PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Table with 4 columns: TANGGAL, PEMBAHASAN MATERI, PARAF, KETERANGAN. Contains handwritten entries for dates like 09-08-2021 and 12-09-2021, and descriptions of revisions to the thesis.

Diketahui / Disetujui oleh :
Doping 1

Handwritten signature of Dr. Rahima br. Purba.

Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.

Medan, 16 November 2021
Diketahui / Disetujui oleh :
Dekan

Official stamp of Universitas Pembangunan Panca Budi and handwritten signature of Dr. Onny Medaline.

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

\*) Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

---

Otomomi daerah tentunya menjadi tantangan tersendiri dari masing-masing pemerintah daerah untuk membuat suatu perencanaan pembangunan daerahnya demi memajukan kesejahteraan daerahnya. Setiap daerah memiliki perbedaan rencana untuk mengelola pemerintah daerahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan kebijakan yang matang agar proses pembangunan dapat menjadi efektif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2018 - 2019. Angka tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 tahun berturut – turut sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 33 kota dan kabupaten x 2 tahun adalah 66 sampel observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis regresi berganda yang pengelolahannya dilakukan dengan program SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Variabel kekayaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Variabel ketergantungan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Kata Kunci : Kinerja Pemerintah Daerah, Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah.**

## **ABSTRACT**

---

*Regional autonomy is certainly a challenge in itself for each regional government to make a regional development plan in order to advance the welfare of the region. Each region has different plans for managing its local government which are tailored to the needs and characteristics of the local government. So it takes a mature policy planning so that the development process can be effective. The purpose of this study was to analyze the influence of the characteristics of local government on the performance of the regional government of North Sumatra province. The sample used in this research is the municipal and district governments in North Sumatra Province during the period 2018 - 2019. The number of years of observation used in this study is 2 consecutive years so that the number of observations in this study is 33 cities and districts x 2 years is 66 observation samples. The data obtained were analyzed using statistical formulas, namely by using multiple regression analysis with the SPSS version 16 management. The results showed that the regional size variable has a partial insignificant effect on the performance of the regional government of North Sumatra Province. partial to the performance of the North Sumatra provincial government. The regional dependency variable has a partially significant effect on the performance of the regional government of North Sumatra Province. The size of the region, the level of regional wealth, the level of regional dependence have a significant effect simultaneously on the performance of the regional government of North Sumatra Province.*

***Keywords: Local Government Performance, Regional Size, Regional Wealth Level and Regional Dependency Level.***

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si, Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Proposal ini.
4. Bapak Suwarno SE., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang juga membantu memberikan bimbingan dan menyelesaikan proposal ini.
5. Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda yang selama hidupnya telah memberikan motivasi dan kasih sayangnya kepada saya.
6. Terimakasih kepada orang terkasih saya dan adik-adik saya yang telah banyak memberikan saya nasihat moral dan materil.



Penulis menyadari penulisan proposal ini belum sempurna. Oleh karena itu, segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang berguna bagi kelengkapan proposal ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat khususnya bagi siapa yang membaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan.

Medan, Juli 2021

Penulis

Darma Junianti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi.....	7
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
1.3.1 Batasan Masalah .....	8
1.3.2 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Teori Agensi Dalam Pemerintahan .....	13
2.1.2 Laporan Keuangan Daerah .....	14
2.1.3 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah .....	20
2.1.4 Karakteristik Pemerintah Daerah .....	21
2.1.5 Ukuran Pemerintah (Size) Daerah .....	21
2.1.6 Tingkat Kekayaan Daerah.....	22
2.1.7 Tingkat Ketergantungan dengan pemerintah pusat..	23
2.1.8 Belanja Modal .....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Konseptual .....	28
2.4 Hipotesis .....	28
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
<b>3.2.1</b> Lokasi Penelitian.....	29
<b>3.2.2</b> Waktu Penelitian.....	29
3.3 Populasi dan Sampel .....	30
<b>3.3.1</b> Populasi.....	30
<b>3.3.2</b> Sampel.....	30
3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	31
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	34

3.6 Teknik Analisis Data .....	34
3.6.1 Uji Statistis Deskriptif.....	34
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	34
3.6.3 Analisis Linier Berganda.....	38
3.6.4 Uji Hipotesis.....	38
3.6.4.1 Uji Parsial .....	38
3.6.4.2 Uji SImultan .....	39
3.6.5 Koefisien Determinasi .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Instansi Pemprov Sumatera Utara .....	44
4.1.1 Sejarah Singkat .....	44
4.1.2 Visi dan Misi.....	45
4.1.3 Prioritas Pembangunan .....	46
4.1.4 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara.....	46
4.2 Statistik Deskriptif.....	47
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	48
1. Uji Normalitas .....	48
2. Uji Kolmogrof Smirnof .....	51
3. Uji Multikolinieritas.....	52
4. Uji Autokorelasi .....	53
4.4 Regresi Linier Berganda .....	54
4.5 Uji Hipotesis .....	55
4.5.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t) .....	55
4.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	57
4.5.3 Koefisien Determinasi .....	58
4.6 Pembahasan.....	59
4.6.1 Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemda.....	59
4.6.2 Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemda.	60
4.6.3 Pengaruh Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Pemda .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Kinerja Beberapa Pemerintah Daerah Di Sumatra Utara Urutan Pada Tahun 2018 .....	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya .....	25
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional.....	32
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif .....	47
Tabel 4.2 Tabel Kolmogrof Smirnof.....	49
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	54
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda .....	54
Tabel 4.6 Uji Hipotesis Parsial.....	55
Tabel 4.7 Uji Hipotesis Simultan .....	58
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	58



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	27
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas .....	50
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas .....	50
Gambar 4. Scarltterplot Herterokedesitas .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan yang direncanakan oleh berbagai komponen *stake holder* yang terkait. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerahnya dapat diukur melalui kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan adanya undang undang tentang otonomi daerah maka pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.

Otomomi daerah tentunya menjadi tantangan tersendiri dari masing-masing pemerintah daerah untuk membuat suatu perencanaan pembangunan daerahnya demi memajukan kesejahteraan daerahnya. Setiap daerah memiliki perbedaan rencana untuk mengelola pemerintah daerahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan kebijakan yang matang agar proses pembangunan dapat menjadi efektif.

Kinerja pemerintah daerah harus mendapatkan pengawasan secara langsung dari berbagai *stake holder* agar proses pembangunan daerah menjadi efektif. Diharapkan dengan adanya pengawasan dapat menghindari terjadinya praktik kecurangan berupa penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat luas dan menguntungkan suatu kelompok tertentu. Maka dari itu

Kementrian Dalam Negeri sebagai salah satu kementrian pusat yang berperan sebagai pengawas bagi masing – masing daerah dalam menjalankan kebijakannya.

Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Menurut PP tersebut pasal 1, EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan indikator kinerja kunci. Mustikarini dan Fitriasari (2010)

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai oleh penyedia jasa dan barang-barang publik. Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai evaluasi bagaimana program tersebut berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan, dan sebagai alat komunikasi dengan publik.

Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) juga mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemda memperoleh informasi yang dapat



meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian terkait kinerja pemda dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012). Sudarsana dan Rahardjo (2013) juga melakukan penelitian yang sama yaitu menguji pengaruh ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2010; namun penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian Astuti (2010) bahwa ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota, sedangkan hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan tidak ada tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota.

Ukuran pemerintah (*Size*) adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar Sudarsana dan Rahardjo (2013). Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki

tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi.

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumarjo (2010). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda.

Mustikarini (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. *Intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah Panji (2010). Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Mustikarini dan Fitria, (2012).

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) suatu pemda, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi kecurangan. Dalam UU No. 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemeriksaan didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK salah satunya berupa temuan audit. Hasil penelitian Widya Astuti (2010) dan penelitian Yayuk Harumiati (2012) menyatakan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan semakin besar temuan audit menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemda terhadap peraturan perundangan. Dengan demikian temuan audit BPK dapat memengaruhi kinerja pemda kabupaten/kota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara adalah salah satu pemerintah daerah yang berupaya menyediakan layanan publik semaksimal mungkin agar pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai. Pemerintah daerah lebih bertanggungjawab (*akuntabel*) dan transparan dalam setiap kebijakan,



tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan kinerja beberapa daerah kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara.

**Tabel 1.1 Kinerja Beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara**

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pengeluaran (000)	Alokasi Anggaran (000)	Kinerja (%)
1	Kota Medan	Rp 4.523.672.134.655	Rp 5.735.922.591.995	78,87
2	Kota Gunung sitoli	Rp 705.994.577.295	Rp 886.174.944.646	79,67
3	Kabupaten Nias	Rp 796.267.893.540	Rp 961.460.307.312	82,82
4	Kabupaten Mandailing Natal	Rp 1.210.230.197.267	Rp 1.405.739.733.820	86,09
5	Kota Tebing tinggi	Rp 471.970.083.481	Rp 582.196.413.997	81,07
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp 979.815.307.818	Rp1.144.449.253.992	85,61
7	Kabupaten Labuhan Batu	Rp 1.126.516.217.551	Rp 1.323.603.221.192	85,11

Sumber : LK BPK 2018

Data di atas menggambarkan bagaimana kondisi kinerja pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan pada laporan kinerja pemerintah daerah Sumatera Utara di berbagai kabupaten dan kota dilihat bahwasannya kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara masih rendah hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah daerah masih belum sesuai dengan harapan yang ditetapkan sesuai anggaran pembangunan daerah provinsi Sumatera Utara. Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah provinsi dan kota se Sumatera Utara, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Beberapa hal hal yang menyebabkan perbedaan kinerja itu sendiri yaitu perbedaan karakteristik pemerintah daerah provinsi dan kota yang ada di Sumatera Utara menjadi salah satu penyebab perbedaan ukuran atau kekayaan pemerintah daerah sehingga total pendapatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kota juga

berbeda. Setiawan (2012). Tingkat kekayaan daerah yang diukur dari pendapatan asli daerah baik dari pajak dan retribusi tiap daerah yang ada di provinsi Sumatera utara berbeda, Adapun perbedaan karakteristik nilai nominal transfer yang diterima pemerintah daerah berbeda sesuai dengan Dana Alokasi Umum yang ditetapkan oleh APBN menyebabkan perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh pemda. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menilai sejumlah Pemerintah Daerah di provinsi Sumatera Utara tidak serius dalam mengelola aset jika di lihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan beberapa tahun terakhir di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

## **1.2 Identifikasi**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kinerja pemerintah daerah beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara masih rendah hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah daerah masih belum sesuai dengan harapan yang ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Alokasi anggaran beberapa pemerintah daerah di tahun 2018 kecil sehingga dapat menghambat pembangunan daerah tersebut.

- c. Perbedaan ukuran daerah yang dilihat dari kekayaan pemerintah daerah menyebabkan perbedaan alokasi prioritas anggaran pembangunan daerah.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis karakteristik pemerintah daerah yang mencakup ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat, belanja daerah adalah sebagai variabel bebas (variabel independen atau  $X_1, X_2, X_3$ ), sedangkan Kinerja adalah variabel terikat (variabel dependen atau  $Y$ ). Masalah yang dibatasi termasuk variabel, lokasi dan waktu penelitian. Pada penelitian ini penelitian dilakukan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dibatasi sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Apakah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dengan pusat berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan yaitu:

- a. Untuk menganalisis pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Untuk menganalisis pengaruh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dengan pusat berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

#### **1.4.2.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi publik yaitu dalam hal peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pemerintah daerah.

#### **1.4.2.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Semoga penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam akuntansi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama perkuliahan di dalam kondisi praktis yang ada di sekitar masyarakat serta merupakan sarana pengembangan wawasan dan pengembangan analisis tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi atau sarana referensi bagi peneliti lain apabila akan melakukan penelitian dengan variabel atau faktor-faktor yang terkait.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Galang Afran (2016) dari Universitas Riau yang berjudul : “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan *Leverage* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). Sedangkan penelitian ini berjudul : “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”.

Perbedaan penelitian terletak pada :

1. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan 5 (lima) variabel bebas yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat

ketergantungan daerah, temuan hasil audit dan leverage dan 1 (satu) variabel terikat yaitu kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu bebas yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kinerja.

2. **Model Penelitian** : Dalam penelitian terdahulu menggunakan model penelitian path analisis untuk 6 (enam) variabel, Sedangkan penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk 5 (lima) variabel.
3. **Jumlah Observasi / Sampel (n)** : Penelitian terdahulu berjumlah 12 kota atau kabupaten sedangkan penelitian ini berjumlah 33 kota atau kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
4. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.
5. **Lokasi Penelitian** : Lokasi penelitian terdahulu di Riau, sedangkan penelitian ini dilakukan di Medan. Perbedaan model penelitian, variabel penelitian, jumlah observasi/ sampel, waktu dan lokasi penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **3.7 Landasan Teori**

##### **3.7.1 Teori Agensi Dalam Pemerintahan**

Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran pembangunan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap *stake holder* terkait demi kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut Setiawan (2012) mengenai teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemda akan menghasilkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat haruslah transparan dan akuntabel. Hal itu bertujuan agar mampu memberikan informasi yang berimbang antara pihak *agent* dengan *principal*. Dengan demikian informasi yang disampaikan akan mengurangi adanya *information asymatry* maka kemungkinan tindak kejahatan korupsi akan berkurang.

Dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agen* Abdullah dan Halim (2010). *Agency problem* muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agen*. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agen* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak



dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Setiawan (2012).

### **3.7.2 Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan daerah menjadi salah satu instrument penting bagi masyarakat secara luas untuk melihat bagaimana kinerja suatu pemerintah daerah. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan juga bisa dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 prg 3/ PP No. 17 tahun 2010 menjelaskan definisi Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan

keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mewajibkan Pemerintah pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan ini kemudian akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Mustikarini (2010) Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban dalam suatu entitas Choiriyah (2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Sumarjo (2010). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggaran terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: Aset, Kewajiban, Ekuitas dana, Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan arus kas
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
4. Laporan perubahan ekuitas
5. Laporan operasional
6. Laporan realisasi anggaran
7. Catatan laporan keuangan

Menurut Bastian (2010) laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi:

1. Relevan, agar bermanfaat informasi laporan keuangan harus sesuai untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi



mereka dimasa lalu. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (*timelines*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal (*reliable*)

Informasi memiliki kualitas andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan laporan keuangan secara jujur (*Faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar. serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta pengertian

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

d. Dapat Dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecenderungan (*trend*) perubahan posisi dan kinerja keuangan secara relatif. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut di jelaskan pada periode terjadinya perubahan.

e. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

### 3.7.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggara pemerintah daerah menjadi salah satu indikator yang digunakan mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan rencananya yaitu mensejahterakan masyarakat secara umum. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Mustikarini, 2010). Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Keputusan menteri dalam negeri republik indonesia no 120 – 4761 tahun 2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2013 menteri dalam negeri republik indonesia, yang menimbang bahwa, untuk melaksanakan

ketentuan pasal 27 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menetapkan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2013.

Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan yang digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan dengan sumber utama LPPD yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (PP No. 6 tahun 2008). Tujuan utama dilaksakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

### **3.7.4 Karakteristik Pemerintah Daerah**

#### **3.7.4.1 Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*)**

Salah satu karakteristik dari pemerintah daerah yang mendeskripsikan suatu daerah dan membedakannya dengan daerah lain yaitu karakteristik berdasarkan ukuran pemerintah daerah (*size*). *Size* adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula,

sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti (2010), Yayuk Harumiyati (2012), dan Galang (2010) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai informasi bahwa *size* perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur *size* perusahaan (Nasser, 2010).

#### **3.7.4.2 Tingkat Kekayaan Daerah**

Karakteristik pemerintah daerah yang membedakannya dengan daerah lain dapat diukur berdasarkan tingkat kekayaan suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki kekayaan yang besar merupakan suatu modal bagi daerah tersebut untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah daerah. Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumarjo (2010). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah



daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Mustikarini (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Tingkat kekayaan daerah ini diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Menurut Indrarti (2011) berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan

dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

#### **3.7.4.3 Tingkat Ketergantungan Dengan Pemerintah Pusat.**

Dalam menjalankan roda pemerintahan suatu pemerintah daerah tidak sepenuhnya mandiri walaupun ada undang undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Suatu pemerintah daerah masih tetap bergantung dan membutuhkan suatu bantuan dari terhadap pusat. Dengan desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Syahrudin (2010). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Menurut Mustikarini (2010) *intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintahdaerah. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Mustikarini dan Fitria (2012).

#### **3.7.5 Belanja Modal**

Dalam menjalankan roda ekonomi secara keseluruhan pemerintah

daerah tidak terlepas dari belanja modal untuk menjalankan rencana pemerintah daerah tersebut. Menurut Halim (2014) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli.

Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Abdullah : 2010).

### 3.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Yayuk Harumiati (2012)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah 5) Temuan Audit	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Tingkat kekayaan, Ukuran Daerah, tingkat Ketergantungan daerah terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja sedangkan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja,
2	Galang Afrian (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (Bpk) Dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau)	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah 5) Temuan Audit <i>Leverage</i>	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Ukuran Daerah Tingkat kekayaan, tingkat Ketergantungan daerah dan <i>Leverage</i> terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja
3	Widya Astuti (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah 5) Temuan Audit	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Tingkat kekayaan, Ukuran Daerah, tingkat Ketergantungan daerah terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja sedangkan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
4	Ponco Susilawati (2016)  Peneliti	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris Pada	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah 5) Temuan Audit Variabel X	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Ukuran Daerah Tingkat kekayaan, tingkat Ketergantungan daerah dan <i>Leverage</i> terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan Hasil Penelitian

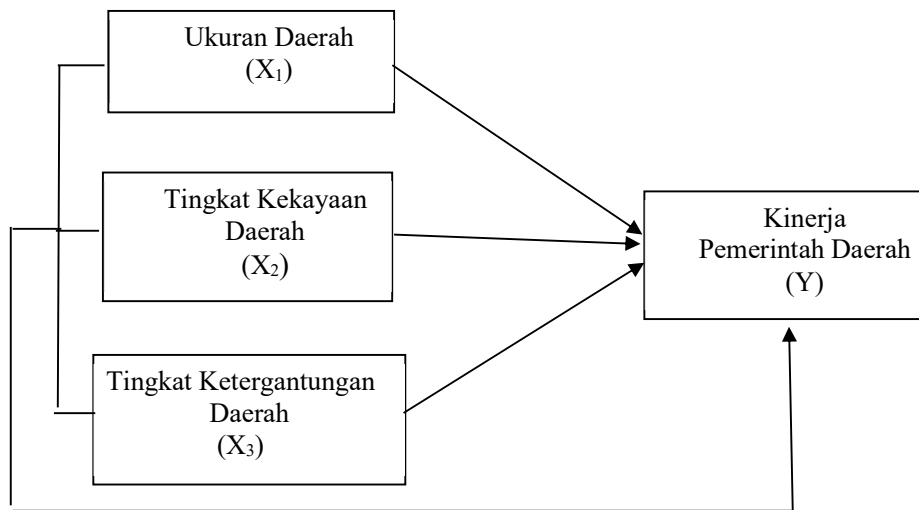
		Pemerintah Daerah) Judul		Variabel Y	Model Analisis	
5	Veriza Nanda (2017)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Tahun Anggaran 2013-2014)	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah Temuan	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Ukuran Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan tingkat kekayaan, tingkat Ketergantungan daerah dan <i>Leverage</i> terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja

Sumber : Penulis, (2021)

### 2.3 Kerangka Konseptual

Hubungan antar variabel di dalam penelitian ini dijelaskan oleh beberapa jurnal yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Harumuati (2012) menyatakan bahwa Ukuran Daerah, tingkat Ketergantungan daerah terhadap total pendapatan Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Dengan desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Syahrudin (2010). Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.





**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Menurut Manullang dan Pakpahan (2014), mengemukakan bahwa hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang dianggap benar agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah dengan pusat berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala Rusiadi (2013). Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola bentuk pengaruh antar variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Analisis data kuantitatif digunakan pada saat peneliti menggunakan pendekatan penelitian survey, penelitian eksperimen, penelitian kuantitatif dan beberapa penelitian lainnya yang mengandung data - data berupa angka - angka Manullang dan Pakpahan (2014).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi penelitian : Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2019.
2. Waktu penelitian : Peneliti mulai melakukan penelitian ini dari bulan Mei 2020 - Maret 2021.



dari 100 sehingga semua populasi ditarik dan dijadikan sampel. Rusiadi (2014). Sehingga disimpulkan bahwasannya jumlah sampel pada penelitian ini adalah 33 kabupaten atau kota pemerintah daerah Sumatera Utara pada tahun 2018 dan 2019.

### **3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional**

#### **3.4.1 Variabel Penelitian**

Pada penelitian ini ditetapkan beberapa variable yang akan dianalisis venomena masalah yang terkait. Variabel penelitian pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan memiliki nilai serta variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Rusiadi (2013). Hadi dalam Rusiadi (2013) menyatakan bahwa variabel merupakan semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Manullang, M dan Pakpahan (2014) menyatakan bahwa variabel merupakan suatu sifat-sifat yang dipelajari, suatu simbol, atau lambang yang padanya melekat bilangan atau nilai, dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai.

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, dan untuk variabel independennya adalah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat, dan temuan audit.

### 3.4.2 Defenisi operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel dan indikator pada penelitian/ Selanjutnya definisi operasional menggambarkan pula pengukuran atas variabel dan indikator yang dikembangkan pada penelitian. Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup variabel penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan intrumen/alat ukur. Rusiadi (2013). Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian, maka disajikan tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional**

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala
1	Dependen (Y) Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Bastian (2010).	$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Alokasi Anggaran}}$	Rasio
2	Independen (X1) Ukuran Daerah	Ukuran daerah merupakan jumlah PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Mardiasmo (2010).	logaritma natural (Ln) Total (PAD + DAU + DAK+DL)	Rasio
3	Independen (X2) Tingkat Kekayaan Daerah	Tingkat kekayaan daerah daerah menggambarkan jumlah atau tingkat kemandirian pemerintah daerah yang bersumber dari	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio

		pendapatan asli daerah (Mustikarini dan Fitriyani 2012).		
4	Independen (X3) Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	<i>Intergovernmental revenue</i> adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. (Mustikarini dan Fitria, 2012)	$\frac{\text{DAU} + \text{DAK} + \text{DL}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio

Sumber : Diolah penulis 2021

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kab/kota Tahun 2018 dan 2019 yang diakses melalui situs atau melalui situs [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Data skor kinerja penyelenggara pemda kabupaten/kota diperoleh dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk LPPD tahun anggaran 2018 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 120-257 Tahun 2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggara pemerintah daerah secara nasional, dan diakses melalui situs [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).



### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat tabel statistik

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan.

Terdapat empat tahap, yaitu :

##### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mengetahui residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara uji grafik, dan uji statistik. Pada uji grafik dapat dikatakan normal apabila dalam *probability plot* ada penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Setelah uji grafik, dilanjutkan dengan uji statistik, yaitu *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila  $p < 0,50$  maka data tidak terdistribusi secara normal.

2) Apabila  $p > 0,50$  maka data terdistribusi secara normal. Ghozali (2016).

### 3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Sedangkan untuk mengetahui gejala tersebut dapat dideteksi dari besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*) melalui program SPSS. Rusiadi (2013).

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model. Kemiripan antar variabel bebas akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini dilakukan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu:

VIF  $> 10$  artinya mempunyai persoalan multikolinieritas

VIF  $< 10$  artinya tidak terdapat multikolinieritas

*Tolerance value*  $< 0.1$ , artinya mempunyai persoalan multikolinieritas

*Tolerance value*  $> 0.1$ , artinya tidak terdapat multikolinieritas

Rusiadi (2013) dan Sugiyono (2016)

Nilai *tolerance* dapat dicari dengan rumus:

$$Tolerance = (1 - R_j^2)$$

Dimana  $R_j^2$  = nilai determinasi dari regresi.

Sedangkan nilai VIF dapat dicari dengan rumus:

$$VIF = \left( \frac{1}{Tolerance} \right)$$

### 3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Model regresi dikatakan baik apabila bebas dari autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Cara mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji DW yang menggunakan tabel statistik dari *Durbin-Waston* (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi Ghozali (2010) Kriteria penilaian dengan Durbin Weston adalah sebagai berikut :

1. Nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Nilai D-W di atas 2 berarti ada autokorelasi negatif.

### 3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2010).

### 3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama ataupun secara parsial. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan *software* komputer yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 16,0 Ghozali (2010). Maka model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja

a = Konstanta

$\beta_1...3$  = Koefisien Regresi

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Tingkat Kekayaan Daerah

X3 = Tingkat Ketergantungan Daerah

e = Standar error

Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) Ghozali (2010).

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.6.4.1 Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya suatu variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen secara parsial.

Probabilitas atau signifikansi dalam penelitian ini adalah 5%. Rusiadi (2014)

Hipotesis yang akan diuji adalah :

1.  $H_0 : \beta_1 = 0$ , maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2.  $H_0 : \beta_1 > 0$ , maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.
3.  $H_a \beta_1 < 0$ , maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila dalam penelitian ini probabilitas ( $\alpha$ )  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila dalam penelitian ini probabilitas ( $\alpha$ )  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **3.6.4.2 Uji Statistik F**

Menurut Ghozali (2012) pada dasarnya uji F menunjukkan arah apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama. menurut Sugiyono (2016) pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

1. Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
2. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Uji F dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi F yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan SPSS versi 16.0. Jika angka signifikansi F lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

### **3.6.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Sugiyono (2016). Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.



Cara menghitung koefisien determinasi yaitu: Sugiyono (2016)

$$r^2 = (r_{xy})^2$$

Dimana :

$r^2$  = Koefisien Determinan

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi *Product Moment*

Di mana rumus untuk mencari Koefisien korelasi product Moment sebagai berikut: Sugiyono (2016)

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi product moment

x = Variabel bebas

y = Variabel tetap

Koefisien korelasi antara variabel  $X_1$  dengan Y dan  $X_2$  dengan Y dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi Carl Pearson: Sugiyono (2016)

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i) (\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi product moment

n = Jumlah sampel

$x$  = Skor variabel  $x$

$y$  = Skor variabel  $y$

$\sum x$  = Jumlah skor variabel  $x$

$\sum y$  = Jumlah skor variabel  $y$

$\sum x^2$  = Jumlah kuadrat skor variabel  $x$

$\sum y^2$  = Jumlah kuadrat skor variabel  $y$

Untuk mencari hubungan kedua variabel bebas ( $X_1, X_2$ ) dengan variabel terikat  $Y$  dapat dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi ganda ( $R_{x_1x_2y}$ ).

(Sugiyono, 2016:287)

$$R_{x_1x_2y} = \sqrt{\frac{r_{x_1y}^2 + r_{x_2y}^2 - 2(r_{x_1y})(r_{x_2y})(r_{x_1x_2})}{1 - r_{x_1x_2}^2}}$$

Keterangan:

$R_{x_1x_2y}$  = Koefisien korelasi ganda antar variabel  $X_1$  dan  $X_2$  secara bersamaan dengan variabel  $Y$

$r_{x_1y}$  = Koefisien korelasi  $X_1$  terhadap  $Y$

$r_{x_2y}$  = Koefisien korelasi  $X_2$  terhadap  $Y$

$r_{x_1x_2}$  = Koefisien korelasi  $X_1$  terhadap  $X_2$

Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu memiliki koefisien korelasi - 1 atau = -1, maka hubungan tersebut sempurna.

Jika terdapat  $r = -1$  maka terdapat korelasi negatif sempurna, artinya setiap peningkatan pada variabel tertentu maka terjadi penurunan pada variabel lainnya. Sebaliknya jika didapat  $r = 1$ , maka diperoleh korelasi positif sempurna, artinya ada hubungan yang positif antara variabel, dan kuat atau tidaknya hubungan ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi, dan koefisien korelasi adalah 0 maka tidak terdapat hubungan.

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuatnya hubungan  $x$  terhadap  $y$ , maka dapat digunakan pedoman tabel berikut:

**Tabel 3.4. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2016)

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan  $r_{\text{tabel}}$  product moment dengan taraf signifikan 0.05 (taraf kepercayaan 95%).

Kaidah pengujian signifikan : Sugiyono (2016)

1. Jika  $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$ . Maka tolak  $H_0$  artinya ada hubungan yang signifikan.
2. Jika  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ . Maka terima  $H_0$  artinya tidak ada hubungan yang signifikan.

Untuk mengetahui kontribusi variabel X terhadap Y, dapat dicari dengan menggunakan rumus koefisien determinasi. Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$D = r^2 \times 100\%$$

Keterangan

D = Nilai Koefisien determinasi

R<sup>2</sup> = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara

ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023**

##### **a. Visi**

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.

##### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- 2) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- 3) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- 4) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- 5) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

#### **4.1.3 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara**

- 1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
- 2) Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
- 4) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- 5) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

#### **4.1.4 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara**

**Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara**

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Nias	18	Kabupaten Serdang Berdagai
2	Kabupaten Mandailing Natal	19	Kabupaten Batu bara
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	20	Kabupaten Padang lawas utara



4	Kabupaten Tapanuli Tengah	21	Kabupaten Padang lawas
<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
5	Kabupaten Tapanuli Utara	22	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
6	Kabupaten Toba Samosir	23	Kabupaten Labuhan Batu Utara
7	Kabupaten Labuhan Batu	24	Kabupaten Nias Utara
8	Kabupaten Asahan	No	Kabupaten/Kota
9	Kabupaten Simalungun		
10	Kabupaten Dairi	25	Kabupaten Nias Barat
11	Kabupaten Karo	26	Kabupaten Sibolga
12	Kabupaten Deli Serdang	27	Kota Tanjung Balai
13	Kabupaten Langkat	28	Kota Pematang Siantar
14	Kabupaten Nias Selatan	29	Kota Tebing Tinggi
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	30	Kota Binjai
16	Kabupaten PakPak Barat	31	Kota Medan
17	Kabupaten Samosir	32	Kota Padang Sidempuan
		33	Kota Gunung sitoli

Sumber : <http://www.sumutprov.go.id>

## 4.2 Statistik Deskriptif

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan data deskriptif kinerja pemerintah daerah, ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2018-2019.

**Tabel 4.1 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Ukuran Daerah	66	6.48E7	5.52E9	1.3123E9
Kekayaan Daerah	66	1.33	98.38	10.6279
Ketergantungan Daerah	66	56.44	97.14	87.6059
Kinerja	66	71.90	122.40	94.8077
Valid N (listwise)	66			

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah N (sampel) pada penelitian ini adalah 66. Nilai minimum kinerja daerah sebesar 71,90% pada daerah Kabupaten Simalungun di tahun 2018. Adapun nilai maksimum tingkat kinerja daerah sebesar 122,40% pada daerah Kabupaten Langkat di tahun 2019.

Nilai rata – rata tingkat ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 94,80%.

Nilai minimum ukuran daerah sebesar 64.768.624 pada daerah Kota Tebing Tinggi di tahun 2019. Adapun nilai maksimum ukuran daerah sebesar 5518768106 pada daerah Kota Medan di tahun 2019. Nilai rata – rata ukuran daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 1312335126. Nilai minimum tingkat kekayaan daerah sebesar 1,33% pada daerah Kabupaten Labuhan Batu di tahun 2018. Adapun nilai maksimum tingkat kekayaan daerah sebesar 98,38% pada daerah Kota Tanjung Balai di tahun 2019. Nilai rata – rata tingkat kekayaan daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,26%. Nilai minimum tingkat ketergantungan daerah sebesar 56,43% pada daerah Kota Medan di tahun 2018. Adapun nilai maksimum tingkat ketergantungan daerah sebesar 97,13% pada daerah Kota Nias Selatan di tahun 2019. Nilai rata – rata tingkat ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 87,60%.

### **4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik**

#### **4.3.2 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2011). Jika terbukti ada data yang tidak terdistribusi secara normal, hal tersebut disebabkan adanya beberapa data yang memiliki karakter dan nilai terlalu berbeda yang bisa disebabkan oleh kesalahan pengambilan sampel, kesalahan input data, atau karena adanya karakteristik data yang sangat berbeda dari yang lainnya. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kolmogrof simornov dan analisis grafik.

## 1. Uji Kolmogrof Simornof

Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan *kolmogrof simirnof*:

**Tabel 4.2 Tabel Kolmogrof Simornoff**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.73148482
Most Extreme Differences	Absolute	.189
	Positive	.189
	Negative	-.125
Kolmogorov-Smirnov Z		1.537
Asymp. Sig. (2-tailed)		.018

a. Test distribution is Normal.

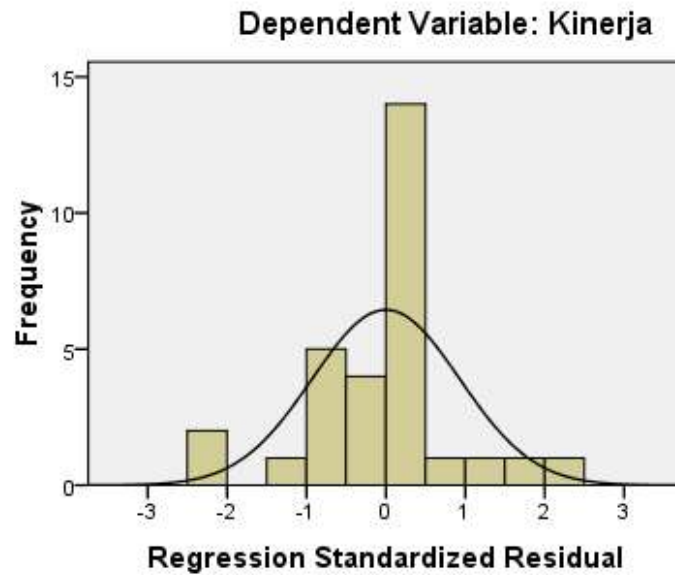
*Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021*

Berdasarkan pada Tabel 4.3 maka dapat disimpulkan data bersifat normal karena nilai Kolmogorov Smirnov di atas 0,05. Sehingga data dikatakan terdistribusi secara normal.

Adapun analisis asumsi klasik dilihat dengan cara analisa grafik. Uji ini dilakukan dengan cara melihatpenyebaran data (titik) pada sumbu diagonal atau grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan meilihat histogram dari residualnya:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsi normlaitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola

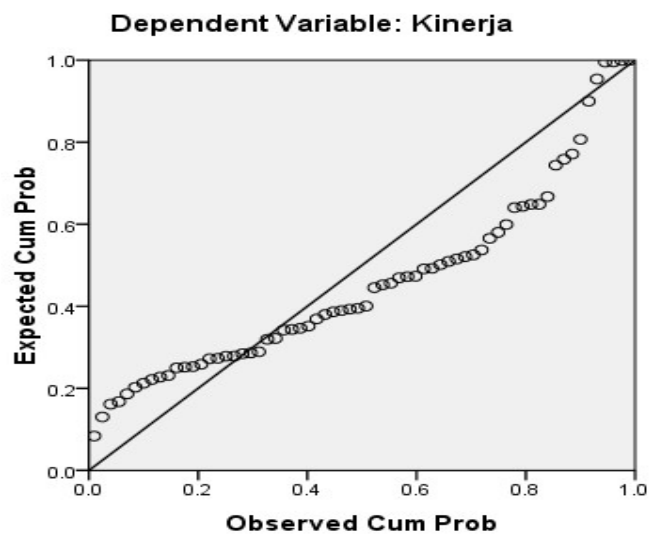
distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



**Gambar 4.4 Grafik Histogram Uji Normalitas**

*Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021*

Berdasarkan dari histogram tersebut, menunjukkan pola regresi normal yang memenuhi asumsi normalitas karena pada histogram terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya.



**Gambar 4.5 Grafik Normal P-P Plot**

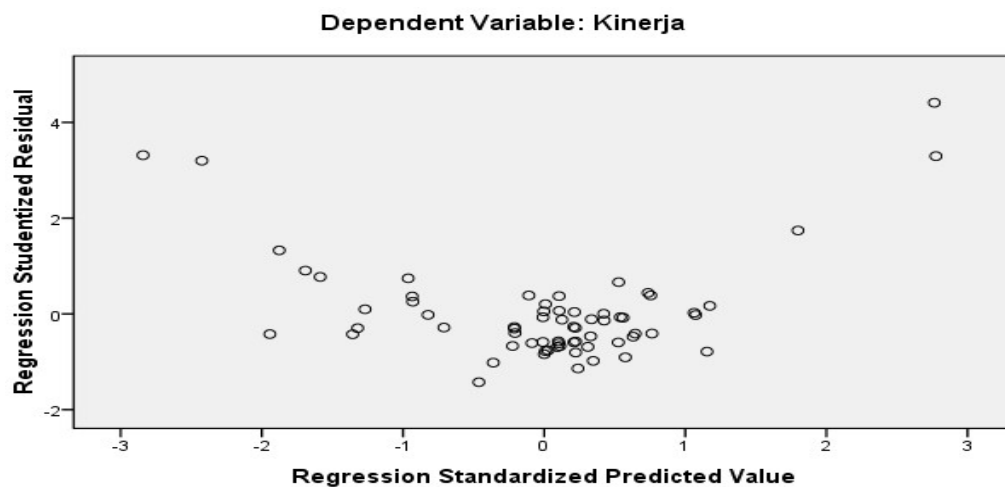
Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa penyebaran data (titik) berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 45 derajat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data-data dalam penelitian terdistribusi normal (Ghozali,2010).

**2. Uji Heterokedesitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan lainnya model regresi yang tidak baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Berikut adalah hasil uji heterokedesitas



### Gambar 4.4 Scatterplot Heterokedesitas

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Santoso.2012).

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model (Constant)	Collinearity Statistics	
	Tolerance	Vif
Ukuran Daerah	0.673	1.486
Tingkat Kekayaan Daerah	0,698	1.432
Tingkat Ketergantungan Daerah	0,957	1.045

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk

masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

- 1) Nilai *tollerance* variabel Ukuran Daerah sebesar  $0,673 > 0,1$  dan VIF variabel Ukuran Daerah sebesar  $1,486 < 10$ , sehingga variabel Ukuran Daerah dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 2) Nilai *tollerance* variabel Tingkat Kekayaan Daerah sebesar  $0,698 > 0,1$  dan VIF variabel Tingkat Kekayaan sebesar  $1,432 < 10$ , sehingga variabel Tingkat Kekayaan Daerah dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 3) Nilai *tollerance* variabel Tingkat Ketergantungan Daerah sebesar  $0,957 > 0,1$  dan VIF variabel Tingkat Ketergantungan Daerah sebesar  $1,045 < 10$ , sehingga variabel Tingkat Ketergantungan Daerah dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### 3. Uji Autokorelasi

Menurut Gujarati (2012), uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode  $t$  dengan periode sebelumnya  $(t-1)$ . Dalam melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya atau bebas autokorelasi. Autokorelasi biasanya terjadi pada data *time series* dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* hal ini karena observasi – observasi pada data *time series* mengikuti urutan alamiah antar waktu sehingga observasi - observasi secara berturut-turut mengandung interkorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test). Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.



**Tabel 4.4 Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	Durbin-Watson
1	0.997	0.993	0.993	0.74897	0.993	1,614
a. Predictors: (Constant), Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah						
b. Dependent Variable: Kinerja Daerah						

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson  $1,614 < 2$ , sehingga terbebas dari autokorelasi.

#### 4.4 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variable bebas terhadap satu variable terikat dan memprediksi variable terikat dengan menggunakan dua atau lebih variable bebas. Berikut tabel hasil analisis regresi linier berganda :

**Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-316.320	7.204		-43.907	0.000
Ukuran Daerah	-0.056	0.167	-0.004	-0.334	0.739
Kekayaan Daerah	3.207	1.118	-0.036	-2.868	0.006
Ketergantungan Daerah	93.567	1.002	0.997	93.403	0.000
a. Dependent Var: Kinerja Daerah					

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut  $Y = -316,32 - 0,056X_1 + 3,207X_2 + 93,567X_3 + e$ .

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai kinerja daerah (Y) adalah sebesar  $-316.32$ .
- 2) Jika terjadi peningkatan ukuran daerah sebesar 1, maka kinerja daerah (Y) akan menurun sebesar 0,056.
- 3) Jika terjadi peningkatan kekayaan daerah sebesar 1, maka kinerja daerah (Y) akan meningkat sebesar 3,207.
- 4) Jika terjadi peningkatan ketergantungan daerah sebesar 1, maka kinerja daerah (Y) akan meningkat sebesar 93,567.

#### 4.5 Uji Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya (Dani,2010). Menurut Sekaran (2010) hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

##### 4.5.1 Uji t (Parsial)

Untuk menguji hipotesis yang diajukan apakah hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima atau ditolak, maka dilakukan uji statistik t (uji-t) dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Uji-t ini dilakukan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah) secara parsial terhadap variabel dependen (kinerja daerah). Berikut ini tabel hasil uji hipotesis secara parsial :

**Tabel 4.6**  
**Uji Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-316.320	7.204		-43.907	0.000
Ukuran Daerah	-0.056	0.167	-0.004	-0.334	0.739
Kekayaan Daerah	3.207	1.118	0.036	2.868	0.006
Ketergantungan Daerah	93.567	1.002	0.997	93.403	0.000
a. Dependent Var: Kinerja Daerah					

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.6 hasil uji hipotesis secara parsial dapat diinterpretasikan bahwa :

1) Hasil Uji Hipotesis Ukuran Daerah

Nilai t-hitung  $0,334 < 1,66$  (t-tabel) dan sig  $0,739 > 0,05$  maka H1 ditolak dan H0 diterima, dapat disimpulkan bahwa ukuran daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja daerah ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi negatif antara ukuran daerah dengan kinerja pemerintah daerah yang berarti bahwa dengan kenaikan ukuran daerah sebesar 1% maka kinerja pemerintah daerah akan turun sebesar 0,056 dan sebaliknya apabila ukuran daerah turun sebesar 1% maka berdampak pada naiknya kinerja daerah sebesar 0,056.

2) Hasil Uji Hipotesis Tingkat Kekayaan Daerah

Nilai t-hitung  $5,029 > 1,66$  (t-tabel) dan sig  $0,00 < 0,05$  maka H2 diterima dan H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap

kinerja pemerintah daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi positif antara tingkat kekayaan daerah dengan kinerja pemerintah daerah yang berarti bahwa dengan kenaikan tingkat kekayaan daerah sebesar 1% maka kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 3,207 dan sebaliknya apabila biaya tingkat kekayaan daerah menurun sebesar 1% maka berdampak pada menurunnya nilai kinerja pemerintah daerah sebesar 3,027.

### 3) Hasil Uji Hipotesis Tingkat Ketergantungan Daerah

Nilai t-hitung  $93,403 > 1,66$  (t-tabel) dan sig  $0,00 < 0,05$  maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi positif antara tingkat kekayaan daerah dengan kinerja pemerintah daerah yang berarti bahwa dengan kenaikan tingkat kekayaan daerah sebesar 1% maka kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 3,207 dan sebaliknya apabila biaya tingkat kekayaan daerah menurun sebesar 1% maka berdampak pada menurunnya nilai kinerja pemerintah daerah sebesar 3,027.

#### 4.5.2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel bebas (biaya produksi dan biaya operasional) terhadap variabel terikat (laba bersih). Berikut ini tabel hasil uji hipotesis secara simultan.

**Tabel 4.7 Uji Simultan**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5114.170	3	1704.723	3.039E3	.000 <sup>a</sup>
	Residual	34.780	62	.561		
	Total	5148.949	65			

a. Predictors: (Constant), Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.7 hasil uji hipotesis secara simultan dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 3,039 lebih besar dari F tabel yang sebesar 2,74 dengan taraf signifikan 0,00 yang jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa H4 diterima yang berarti variabel independen (Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat) berpengaruh secara simultan / bersama-sama terhadap variabel dependen (kinerja pemerintah daerah).

#### 4.5.3 Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari pengolahan data dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software SPSS 16.0 for Windows* maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	Durbin-Watson
1	0.997	0.993	0.993	0.74897	0.993	1,614

a. Predictors: (Constant), Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah  
b. Dependent Variable: Kinerja Daerah

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,993 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 99,3% kinerja pemerintah daerah dapat diperoleh dan dijelaskan oleh Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah, sedangkan sisanya 0,7% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model penelitian seperti alokasi belanja modal, pendapatan pajak atau retribusi.

#### **4.6 Pembahasan.**

##### **1. Pengaruh Variabel Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.**

Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,334 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,66 dan signifikan sebesar 0,739, sehingga  $t_{hitung} 0,334 < t_{tabel} 1,66$  dan signifikan  $0,334 > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang menyatakan ukuran daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Veriza Nanda (2017) yang menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan besarnya ukuran daerah menunjukkan bahwasannya daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang besar baik dari pajak, retribusi dan penghasilan lainnya yang diterima daerah tersebut. Semakin besar ukuran daerah menunjukkan tingkat perekonomian yang besar dan dapat dijadikan modal oleh pemerintah untuk meningkatkan anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan ekonomi yang lebih luas dan mandiri. Namun pada penelitian ini ukuran daerah tidak menjamin terealisasinya anggaran yang ada sehingga tidak berdampak pada

kinerja pemerintah daerah yang baik. Beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara memiliki ukuran daerah yang berbeda sehingga setiap daerah memiliki potensi yang berbeda dalam menjalankan program pemertintah daerahnya. Selama kurun waktu 2018-2019 beberapa daerah memilii ukuran yang beragam. Di tahun 2019 ukuran daerah terendah ada pada Kota Tebing tinggi sebesar 64.768.624 adapun ukuran daerah tertinggi pada daerah Kota Medan di tahun 2019 sebesar 5.518768106. Dengan rata rata ukuran daerah sebesar 1.312.335.126.

## **2. Pengaruh Variabel Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara**

Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,868 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,66 dan signifikan sebesar 0,006, sehingga  $t_{hitung} 2,868 > t_{tabel} 1,66$  dan signifikan  $0,006 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Yayuk Harumiati (2012)) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari pajak, dan retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi kekayaan alam maupun penduduknya. Dengan besarnya kekayaan daerah dapat menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembangunan karena daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang besar namun apabila sumber pendapatan asli daerah masih kecil maka dibutuhkan peran dari pusat untuk menyeimbangkan pendapatan yang digunakan dalam anggaran pembangunan daerah tersebut.

### **3. Pengaruh Variabel Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera.**

Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 93,403 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,66 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga  $t_{hitung} 93,403 > t_{tabel} 1,66$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan Ketergantungan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Galang Afrian (2016) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah maka berdampak pada kinerja keuangan daerah. Dengan tingginya tingkat ketergantungan daerah menunjukkan bahwasannya daerah tersebut masih bergantung pada penerimaan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bantuan lainnya. Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tersebut masih rendah. Pemerintah daerah dengan tingkat kekayaan daerah yang kecil tentunya membutuhkan transfer dana untuk meningkatkan anggaran pendapatan dalam rangka menjalankan program kegiatan pembangunan daerah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Variabel ketergantungan daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi anggaran yang proporsional guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran ini harus mampu untuk mendorong agar pembangunan antar daerah guna peningkatan pertumbuhan ekonomian daerah bisa cepat dan nantinya tidak akan tertinggal dengan kabupaten/kota yang lainnya.
- b. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang, pemerintah juga perlu mengkaji ulang sektor-sektor unggulan mana saja yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial.

- c. Pemerintah Daerah harus berkomitmen dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan pada *good corporate governance* agar tidak ditemukan temuan audit BPK yang dapat berpotensi pada kerugian pemerintah daerah dalam melaporkan kinerja pemerintah daerah.
- d. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi kemandirian pengelolaan keuangan dan indeks pertumbuhan manusia, sehingga hasil penelitian bisa memiliki kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bastian (2010). Akuntansi Sektor Publik, Erlangga, Surabaya.
- Ghozali, Imam (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali (2010). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, (2014). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salembah Empat, Jakarta.
- Manullang dan Pakpahan (2014). Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis. Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.
- Marihot dan Manuntun (2014). Metode Penelitian Ilmiah. Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.
- Rusiadi, et al, (2013). Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan . Medan : USU Press.
- Sudarsana dan Rahardjo (2013). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Jurnal :

- Abdullah, S. dan Halim, A. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap belanja Pemerintah Daerah, Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Udayana. Bali.
- Astuti (2009). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2013-2014). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 190-201.
- Choiriyah, Umi. (2010). Information Gop Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas.
- Galang A (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. SNA 15 Makasar.

- Indrarti (2011). Hubungan Antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Universitas Riau.
- Mustikarini, W. A. dan Fitriasaki, D. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. SNA 15 Makasar.
- Mustikarini, dan Fitriasaki (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
- Maisyarah, R. (2018). Analisis sistem pengendalian persediaan bahan pembantu packing material terhadap efisiensi biaya persediaan pada pt. Aquafarm nusantara, unit processing plant di serdang bedagai. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 56-61.
- Nasser (2010). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ramadhan, P. R., & Supraja, G. (2019, August). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Growth Income Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI) (Vol. 2, No. 1).
- Setiawan, Wahyu. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Syahrudin (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2013-2014). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Ramadhani, U. (2020). The effect of socialization, tax examination and tax collection on pph at kpp pratama medan petisah. Accounting and Business Journal, 2(1), 71-75.

Veriza Nanda (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Tahun Anggaran (2013-2014). Universitas Bandar Lampung. Lampung.

Widya Astuti (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Universitas Indonesia. Jakarta.

Yayuk Harumiati (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerinntah Derah Dan Temuan Audit Bpk Teradap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Web :

<http://www.bpk.depkeu.go.id>

<http://www.djpk.depkeu.go.id>